

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Negara Indonesia merupakan negara yang menjadi bagian integral dalam sejarah penerapan sistem ketatanegaraan, di dalam sistem tersebut terdapat perundang-undangan yang dinyatakan dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 2 yang berbunyi “Bahwa masyarakat (kedaulatan rakyat) Indonesia diminta menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah yang dilakukan secara Bersama-sama dan diikuti oleh seluruh Provinsi maupun daerah di Indonesia. Penyelenggaraan PILKADA ialah salah satu dari ciri khas negara hukum yang dianut oleh Indonesia itu sendiri (Faqi et al., 2023). Selain itu, yang seperti kita ketahui untuk memilih seorang Presiden dan Wakil Presiden dibutuhkan sebuah Pemilu (Pemilihan Umum). Sejak tahun 1955, Pemilu yang diadakan secara demokratis telah menjadi bagian integral dari kehidupan politik Indonesia. Tradisi ini masih berlanjut hingga saat ini, menggelar pesta demokrasi setiap lima tahun sekali bagi hampir seluruh warga negara (Nurcholis & Rizki Putra, 2020).

Peran utama masyarakat dalam Pemilu, mulai dari persaingan di antara para calon hingga kelangsungan proses pemilihan itu sendiri, menjadi fokus utama. Hal ini mencakup semua tingkatan pemilihan, baik di tingkat lokal maupun nasional. Kampanye dari tiap calon juga memiliki peran penting dalam memengaruhi preferensi pemilih. Pemilihan umum (Pemilu) adalah cara bagi setiap warga negara untuk terlibat secara aktif dalam pemerintahan langsung. Partisipasi politik merujuk pada keterlibatan aktif dari setiap anggota masyarakat dalam proses politik, mulai dari kegiatan di tingkat lokal seperti di kampung atau kelurahan, hingga berpartisipasi dalam partai politik untuk memperebutkan kekuasaan, yang mencapai puncaknya pada saat Pemilu.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2015, yang saat ini telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015

tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Walikota, telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Berdasarkan undang-undang tersebut, pada tahun 2015, Indonesia menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara serentak di 8 provinsi, 170 kabupaten, dan 26 kota pada akhir tahun 2015. Pilkada serentak tahun 2015 merupakan peristiwa politik di Indonesia yang menjadi yang pertama kalinya diadakan secara serentak di seluruh kota/wilayah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, seperti yang diungkapkan oleh Arief Budiman, komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), dalam rapat koordinasi persiapan dan pengelolaan anggaran untuk pilkada serentak tahun 2015. Pemerintah berusaha keras untuk berhasil dalam proses pilkada serentak ini, mengingat bahwa dalam pemilihan sebelumnya, sering kali terjadi berbagai masalah mulai dari proses kampanye, pemungutan suara, hingga penetapan pemenang dari pilkada yang diadakan.

Selain itu, Pemilihan Umum Presiden tahun 2019 (Pilpres 2019) merupakan tonggak penting dalam sejarah demokrasi Indonesia selama 20 tahun terakhir, sejak pemilihan umum multipartai pertama pada 7 Juni 1999 setelah runtuhnya rezim otoriter Orde Baru. Dalam konteks bangsa dan negara, periode 20 tahun adalah waktu yang relatif singkat untuk proses adaptasi, eksperimen, dan pembelajaran menuju kematangan demokrasi. Akibatnya, berbagai dampak yang muncul selama Pilpres 2019 merupakan bagian dari proses pembelajaran tersebut, yang dapat dipahami sebagai konsekuensi logis dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam aktivitas politik dan demokrasi saat ini. (Ode Mudiani, 2023)

Pilkada serentak menjadi tantangan bagi setiap elemen di dalam negara ini, dan salah satu elemennya adalah pemilih (warga negara) yang memiliki hak suara untuk menentukan pemenang dan masa depan setiap daerahnya dalam 5 tahun ke depan. Di antara jutaan pemilih di negara ini, terdapat orang-orang yang pertama kali mengikuti proses pemilihan kepala daerah, yang disebut sebagai pemilih pemula. Pemilih pemula adalah mereka yang berusia 17 tahun atau yang pertama

kali melakukan pemilihan, umumnya merupakan pelajar SMA. Mereka akan mengalami pengalaman pertama kali dalam melakukan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta Presiden dan Wakil Presiden (Anggraini et al., 2022). Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 15 menetapkan bahwa warga negara yang berusia 17 tahun atau lebih, atau telah menikah, memiliki hak suara pada hari pemungutan suara. Namun, untuk menggunakan hak suara tersebut, warga negara harus terdaftar sebagai pemilih sesuai ketentuan yang diuraikan dalam Pasal 16 ayat 1.

Pasal tersebut juga menyatakan bahwa pemilih yang dimaksud dalam ayat 1 tidak boleh mengalami gangguan jiwa atau ingatan, tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan telah berdomisili di daerah pemilihan setidaknya 6 bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara. Hal ini harus dibuktikan dengan kartu tanda penduduk. Selain itu, ayat 3 dari Pasal 16 menyebutkan bahwa seorang warga negara Indonesia yang terdaftar dalam daftar pemilih namun kemudian tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dijelaskan dalam ayat 2, tidak diperbolehkan menggunakan hak suaranya. Berdasarkan hasil pemilu serentak tahun 2019, pemilih pemula memberikan kontribusi yang signifikan sebagai pemilih yang memiliki hak suara di Indonesia, yang terlihat dari peningkatan jumlah suara secara nasional, seperti yang ditunjukkan dalam data Daftar Pemilih Tetap pada Gambar 1.1.



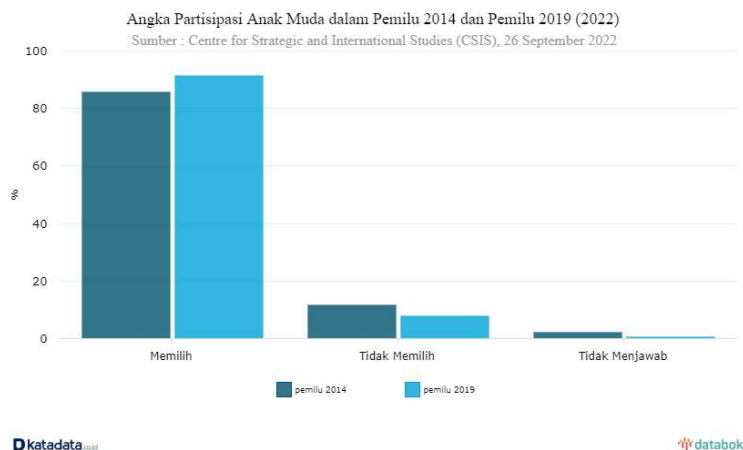
**Gambar 1. 1** Data Rekapitulasi Pemilih Pemula

Pada gambar 1.1 ini menerangkan bahwa angka DPT (Daftar Pemilih Tetap) Pemilu pada tahun 2019 mengalami kenaikan setiap periodenya sehingga perlu melakukan pembaruan serta peningkatan efektifitas dalam menyelenggarakan Pilkada tahun 2020 demi menciptakan pemilih yang aktif dan tidak pasif mengikut serta dalam pemilihan. Seperti terhadap generasi millennial saat ini atau bisa disebut dengan pemilih pemula, mereka merupakan sebuah alat baru dan hal baru yang masih fresh dalam pemilihan Pemilu maupun Pilkada yang akan datang. Para pemilih pemula, sebagai kelompok sosial yang lebih rasional dan kurang pragmatis, seharusnya memahami betapa pentingnya pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil (Faqi et al., 2023). Serta merupakan penyumbang suara terbesar di setiap daerah di Indonesia. Namun dibutuhkannya sosialisasi demi generasi milenial ini dapat memahami dengan baik dan secara sesakma sehingga tidak menjadi penyumbang suara sia sia. Maka dari itu dibutuhkan nya sosialisasi-sosialisasi bagi seluruh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) di setiap provinsi di Indonesia.

“Pemilih pemula, khususnya remaja yang berusia 17 tahun, menunjukkan tingkat antusiasme yang tinggi namun keputusan politik mereka belum sepenuhnya mantap hal ini menjadikan mereka sebagai pemilih swing yang

potensial mereka cenderung belum terpengaruh oleh ideologi tertentu, lebih dipengaruhi oleh dinamika politik lokal, dan mudah dipengaruhi oleh orang terdekat seperti keluarga dan teman-teman media massa juga memiliki pengaruh besar terhadap pilihan mereka, baik melalui berita televisi maupun media cetak seperti spanduk, brosur, dan poster pemilih pemula, terutama remaja, cenderung menghargai kebebasan dan hal-hal yang bersifat informal serta mencari kesenangan selain mencari kesenangan, memiliki kelompok sebaya menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan remaja, sehingga memiliki teman sebaya adalah hal yang esensial dalam pergaulan mereka” menurut *I Gede Suka Astreawan, Anggota KPU Kabupaten Klungkung*

Pemilih pemula dikenal sebagai kelompok yang unik karena mereka menunjukkan tingkat antusiasme yang tinggi, relatif lebih rasional, selalu mencari perubahan, dan cenderung memiliki tingkat pragmatisme yang rendah terhadap kadar polusi. Tingkat kesadaran politik menjadi faktor kunci yang mempengaruhi partisipasi mereka dalam pemilu, seiring dengan pengetahuan dan pemahaman akan hak serta kewajiban terkait lingkungan. Yang membedakan pemilih pemula dari kelompok lain adalah tingkat pengalaman politik mereka dalam menghadapi pemilu. Oleh karena itu, keputusan mereka cenderung tidak stabil dan dapat berubah-ubah sejalan dengan informasi atau preferensi yang mereka terima dari sekitarnya. Para pemilih pemula cenderung tidak peduli dan labil terhadap dunia politik dapat mengakibatkan kurangnya kesadaran dalam berpolitik, yang pada gilirannya mempengaruhi tingkat partisipasi. Melalui pendidikan pemilih dan sosialisasi, diharapkan agar para pemilih pemula dapat berperan aktif dalam menggunakan hak pilihnya.



**Grafik 1. 1** Angka Partisipasi Anak Muda dalam Pemilu 2014 dan Pemilu 2019

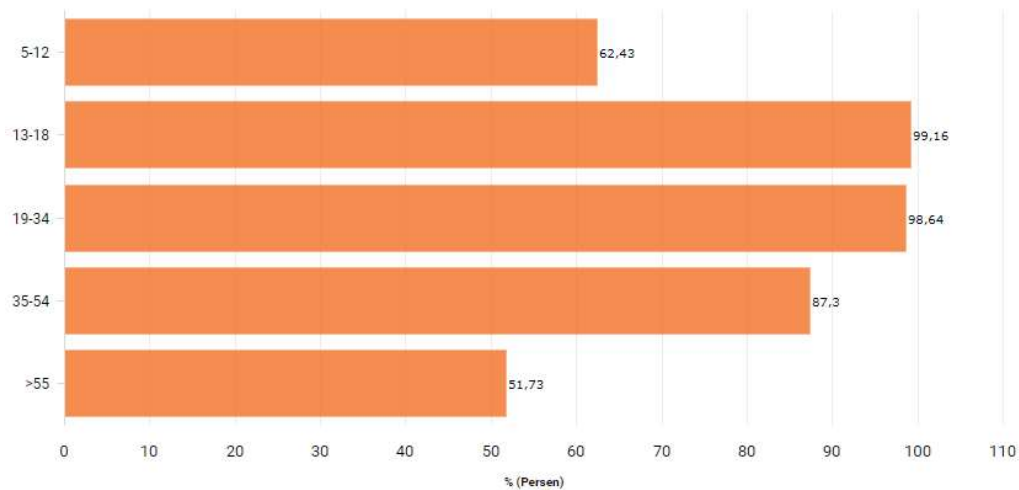
Berdasarkan grafik diatas menunjukkan angka jumlah pemilih berusia muda pada kegiatan Pemilu. Hasil survei dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) menunjukkan bahwa persentase partisipasi pemilih muda di Indonesia mengalami peningkatan dari Pemilu 2014 ke Pemilu 2019. Pada Pemilu 2014, 85,9% dari responden menyatakan bahwa mereka ikut memilih. Sementara itu, 11,8% tidak menggunakan hak pilih mereka, dan 2,3% tidak memberikan jawaban. Namun, pada Pemilu 2019, persentase pemilih meningkat. Sebanyak 91,3% dari responden mengatakan bahwa mereka memilih, sementara 8% memilih untuk tidak ikut serta, dan 0,7% tidak memberikan jawaban.

Partisipasi politik generasi muda saat ini semakin terbuka dan sangat dipengaruhi oleh media sosial yang mereka manfaatkan. Hal ini terjadi karena mereka secara intensif menggunakan platform media sosial. Tanpa mereka sadari, sebagian besar dari mereka telah memperbincangkan topik-topik politik, yang membuat mereka semakin ingin tahu tentang perkembangan politik terkini. Ternyata, pemilih pemula cenderung memilih menggunakan media sosial sebagai sumber informasi untuk pemilihan kepala daerah dan pemilihan presiden, karena mereka menghabiskan banyak waktu di sana. Namun, situasi politik yang memanas

juga berdampak pada konten politik di media sosial yang diakses oleh pemilih pemula, sehingga banyak dari mereka merasa terganggu (Ode Mudiani, 2023).

Media sosial kini telah menjadi salah satu saluran informasi yang paling populer dan sering digunakan. Kemajuan teknologi semakin mempermudah penggunaan media ini. Media sosial dimanfaatkan secara luas sebagai alat komunikasi dalam berbagai bidang, termasuk politik. Dalam konteks media sosial, terdapat tiga aspek utama yang berhubungan dengan sosialisasi, yaitu pengenalan (cognition), komunikasi (communicate), dan kerjasama (cooperation). Mesin politik dari berbagai partai juga memanfaatkan platform media sosial sebagai sarana untuk kampanye politik.

Mereka menyadari bahwa terdapat sekitar 10 juta pemilih pemula, dan suara dari segmen ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan elektabilitas kandidat dalam Pemilu 2019. Media sosial dianggap sebagai alat yang ekonomis namun efektif karena dapat mencapai banyak pemilih dalam waktu singkat (Herning Suryo & Haryo Kusumo Aji, 2019). Teknologi media sosial saat ini memiliki berbagai bentuk, termasuk majalah digital, forum internet, weblog, blog sosial, wiki, jejaring sosial, podcast, foto atau gambar, video, rating, dan bookmark sosial. Setiap bentuk memiliki kelebihan tersendiri, seperti blogging, berbagai gambar atau foto, video blogging, wall-posting, berbagi musik atau lagu, chatting, bahkan VoIP atau Voice over IP, dan lain sebagainya. Di kalangan remaja, terdapat beberapa platform media sosial yang paling populer, antara lain Facebook, WhatsApp, YouTube, LINE, Twitter, Path, dan Messenger. Setiap platform ini memiliki keunggulan masing-masing dalam menarik pengguna dan mempertahankan interaksi sosial mereka.



**Grafik 1. 2** Penetrasi Internet di Indonesia Berdasarkan Umur Tahun (2022)

Berdasarkan tabel grafik diatas, disertai dengan berdasarkan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengungkapkan bahwa penetrasi internet di Indonesia sudah mencapai angka 77,02% pada kurun waktu tahun 2021-2022. Dari hasil tersebut menyatakan bahwa angka penetrasi terbanyak ada pada kelompok usia 13-18 tahun yang dimana sudah mencapai 99,16 %.

Prinsip teknologi dapat dijelaskan sebagai proses meningkatkan aksesibilitas atau kemudahan suatu benda atau konsep yang semula sulit. Teknologi juga berperan sebagai media digital yang digunakan untuk tujuan politik maupun tujuan non-praktis. Media digital membuka ruang komunikasi dan partisipasi politik dengan memperkuat interaksi antara elemen kunci seperti partai politik dan pemerintah. Komunikasi politik telah menjadi fenomena umum di berbagai negara di seluruh dunia. Namun, dalam praktiknya, komunikasi politik sering kali dipengaruhi oleh media tradisional yang dapat menciptakan hambatan. Hal ini merupakan bentuk dari praktik kekuasaan yang dilakukan melalui unsur-unsur komunikasi politik.



Akibat dari luasnya penggunaan media sosial di Indonesia, banyak konten politik yang menyebar melalui platform ini. Komunikasi dapat tersebar melalui individu atau kelompok, memungkinkan informasi untuk menyebar dengan cepat dan luas. Oleh karena itu, banyak politisi memanfaatkan media sosial sebagai alat untuk mempopulerkan diri mereka, yang biasa disebut kampanye. Selain itu, sebagian besar media massa menggunakan media sosial untuk menyebarkan artikel atau konten berita mereka kepada konsumen. Dengan semakin mudahnya akses ke media sosial, setiap individu dalam masyarakat lebih mudah untuk mendapatkan konten politik, yang akan berdampak langsung pada mereka.

Di era revolusi industri 4.0 saat ini, teknologi menjadi elemen kunci yang mendukung berbagai aspek kehidupan, termasuk peran media. Kelompok anak muda, terutama generasi milenial dan generasi Z yang merupakan pengguna internet terbanyak, cenderung menyebarkan pengaruh mereka kepada sesama pengguna media sosial dalam konteks partisipasi politik. Sebagai netizen, mereka memiliki potensi besar untuk memengaruhi partisipasi politik di kalangan pengguna media sosial lainnya, khususnya di kalangan anak muda. Penggunaan media sosial juga merupakan salah satu aspek penting dalam masyarakat modern untuk tetap terhubung dengan perkembangan terbaru dalam era globalisasi. Di Indonesia, lebih dari setengah populasi, yakni sekitar 63,8% dari penduduk pada Januari 2021, menggunakan jejaring sosial. Mayoritas pengguna media sosial adalah kalangan muda, terutama pemilih pemula. (Herning Suryo & Haryo Kusumo Aji, 2019).

Survei Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada tahun 2018 mengungkap bahwa 60,6% generasi Z, yaitu mereka yang lahir antara tahun 1995 hingga 2005, mendapatkan berita politik melalui media sosial. Menurut Wawan Ichwanuddin, peneliti di Pusat Penelitian Politik LIPI, partai politik yang mampu mendominasi konten politik di media sosial memiliki peluang besar untuk menang. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada tahun 2018, jumlah penduduk generasi Z mencapai 66,94 juta jiwa, dan sekitar 30 juta di antaranya adalah pemilih pemula pada Pemilu dan Pilpres tahun 2019.

Pemilih pemula yang mengakses berita politik melalui internet terbagi menjadi tiga kategori berdasarkan intensitasnya. Sebanyak 36% dari mereka mengakses berita politik secara tidak teratur. Sedangkan 22,3% mengakses berita politik melalui media sosial dengan frekuensi yang tinggi, dan 2,3% melakukannya sangat sering. Keterlibatan teknologi dalam politik secara demokratis merupakan indikator penting dari pelaksanaan kekuasaan negara yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Oleh karena itu, dengan adanya teknologi yang mendukung partisipasi politik, masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi politik, mengingat penggunaan teknologi telah menjadi hal yang umum dalam bidang ilmu politik.

Karena itu, menurutnya, sangat penting bagi pemerintah untuk mengatasi penyebaran berita palsu atau hoaks di media sosial. Terdapat kecenderungan bahwa pemilih pemula lebih cenderung mencari informasi melalui gadget, namun pengetahuan literasi politik mereka masih terbatas. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab tim sukses calon presiden untuk mendapatkan dukungan dari generasi milenial. Kesempatan ini sebaiknya dimanfaatkan untuk mendapatkan simpati dan mendapat dukungan dari pemilih baru yang sudah akrab dengan media sosial. Model dan jenis kampanye tentu harus disesuaikan dengan gaya dan lingkungan generasi milenial.

Selain itu, media sosial juga memiliki potensi untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat karena mempermudah akses dan penyebaran informasi secara cepat dan spontan. Di Indonesia, penggunaan media sosial sebagai alat kampanye juga telah diadopsi. Sebelum Pilkada, Partai Politik aktif dalam membuat akun media sosial untuk keperluan kampanye, dimana akun tersebut berisi konten pengenalan berupa visi dan misi dengan tujuan untuk mendapatkan simpati dari pemilih. Namun, untuk memastikan bahwa teknologi berkontribusi secara efektif dalam politik, perlu adanya perhatian strategis dalam penggunaannya. Teknologi dalam politik siber harus disesuaikan dengan nilai-nilai masyarakat dan kebijakan nasional yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari potensi dampak negatif yang dapat muncul di masa depan. Pada

prinsipnya, pola hidup manusia senantiasa berubah seiring dengan kemajuan zaman yang terus berlangsung.

Banyak dari pemilih pemula belum sepenuhnya memahami pentingnya partisipasi dalam proses politik. Mereka mungkin memiliki pengetahuan terbatas tentang calon kepala daerah yang mencalonkan atau bahkan mungkin mengalami kebingungan dalam memilih di Pilkada. Pemilih pemula yang hidup di era digital menghadapi tantangan yang berbeda dari pemilih sebelumnya. Mereka yang lahir di tengah pesatnya teknologi digital memiliki akses mudah terhadap informasi, terutama terkait politik. Hal ini berbeda dengan era sebelumnya, di mana setelah reformasi, politik dan proses informasi mengalami perubahan mendasar, meninggalkan kenangan buruk dari orde baru bagi bangsa Indonesia, di mana kebebasan menjadi hal terbatas dan hak mendapatkan informasi dibatasi. Hal tersebut sangat berbeda pada saat ini, pemerintah dan masyarakat secara umum memberikan dukungan positif bagi kebebasan mendapatkan informasi pada media sosial.

Potensi pemilih pemula dalam suatu pemilihan umum sangatlah penting untuk diperhitungkan. Pada setiap pemilu di Indonesia, pemilih pemula menyumbang sekitar 20-30% dari total pemilih, Kepulauan Riau akan menjadi salah satu provinsi di Indonesia yang akan menggelar PILKADA pada tahun 2024. Diharapkan bahwa masyarakat, terutama pemilih pemula, akan turut serta dalam pemilihan kepala daerah dengan menggunakan hak pilih mereka sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Hal ini merupakan bentuk dari proses demokrasi oleh rakyat untuk memilih pemimpin yang berkualitas dan bertanggung jawab.

Pada Kepulauan Riau sendiri, jumlah pemilih pemula kurang lebih sebanyak 37.158 orang pada PILKADA 2020. Setelah hari pemungutan suara mundur menjadi 9 Desember 2020, terjadi penurunan jumlah pemilih pemula tambahan sebanyak 5.951 orang. Mereka adalah individu yang berusia 17 tahun pada rentang waktu dari 24 September 2020 hingga 9 Desember 2020, atau yang

lahir antara tanggal 24 September 2003 hingga 9 Desember 2003 (KPU Kepulauan Riau). Namun pihak KPU sendiri telah mengeluarkan statement mengenai PEMILU 2024 ini dan menyatakan bahwa angka keseluruhan dari daftar pemilih tetap (DPT) yang dominan ialah pemilih yang berasal dari Gen Y atau generasi millennial yaitu sebanyak 571.918 orang. Dibandingkan dengan pemilih Gen Z yaitu Masyarakat yang lahir pada kurun waktu tahun 1997-2007 yaitu sebanyak 349.563 atau setara dengan 23,29 % dari keseluruhan jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) Pemilu tahun 2024. DPT (Daftar Pemilih Tetap) sendiri telah diklasifikasikan menjadi 753.535 pemilih berjenis kelamin laki-laki dan 747.439 pemilih berjenis Perempuan (Priyo, KPU 2024).



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU TAHUN 2020  
OLEH KPU PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

PROVINSI : KEPULAUAN RIAU

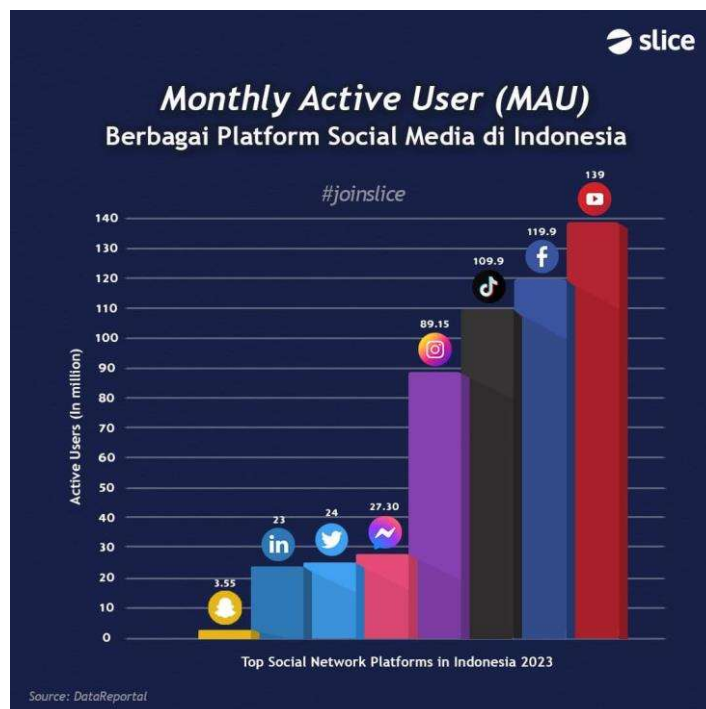
No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kec	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
					L	P	L + P	
1	BINTAN	10	51	353	56,338	54,041	110,379	
2	TANJUNG PINANG	4	18	444	73,276	76,078	149,354	
3	KARIMUN	12	71	555	83,969	81,811	165,780	
4	LINGGA	13	62	244	36,116	34,429	70,545	
5	NATUNA	15	77	170	26,762	26,134	52,896	
6	KEPULAUAN ANAMBAS	10	54	119	16,292	15,415	31,707	
7	BATAM	12	64	2,177	292,440	295,087	587,527	
<b>TOTAL</b>		<b>76</b>	<b>417</b>	<b>4,062</b>	<b>585,193</b>	<b>582,995</b>	<b>1,168,188</b>	

Disahkan dalam rapat pleno KPU Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang, tanggal 18 Oktober 2020

**Tabel 1. 1** Rekap Daftar Pemilih Tetap PILKADA KEPRI 2020

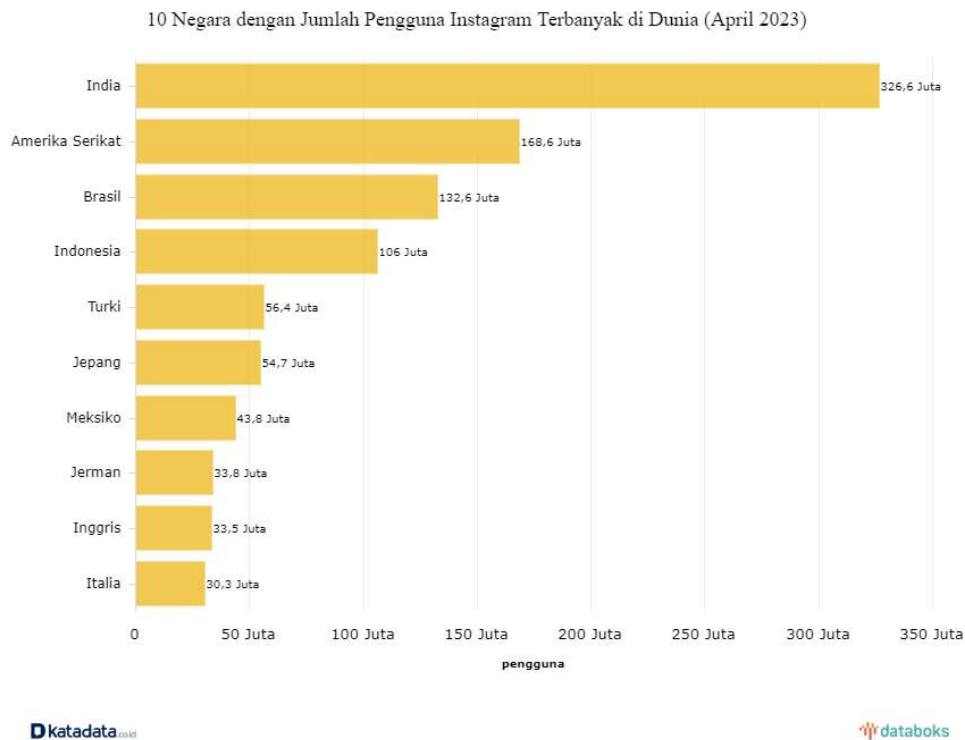
Pada gambar 1.2 merupakan hasil rekapan penghitungan dari keseluruhan jumlah pemilih tetap dari setiap kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau pada PILKADA tahun 2020 yang telah disahkan secara resmi oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) Provinsi Kepulauan Riau di Tanjung Pinang. Dan dari hasil rekapan tersebut, ditemukan hasil bahwa adanya peningkatan jumlah pemilih tetap disetiap daerah nya, yang mana diharapkan juga adanya peningkatan jumlah daftar pemilih tetap pada Pilkada 2024 yang akan datang. Dalam pembicaraan mengenai politik dan dinamika demokrasi di kalangan masyarakat, khususnya di kalangan pelajar yang merupakan pemilih pemula, seringkali mereka memperoleh

informasi dari media sosial, terutama Instagram, yang kini tengah menjadi platform yang sangat populer di kalangan generasi milenial. Instagram berperan sebagai wadah untuk berdiskusi dan mengemukakan pandangan pribadi. Oleh karena itu, pendidikan politik menjadi suatu kebutuhan esensial bagi pemilih pemula agar dapat lebih memahami tentang sosok calon kepala daerah yang akan memimpin di wilayah mereka.



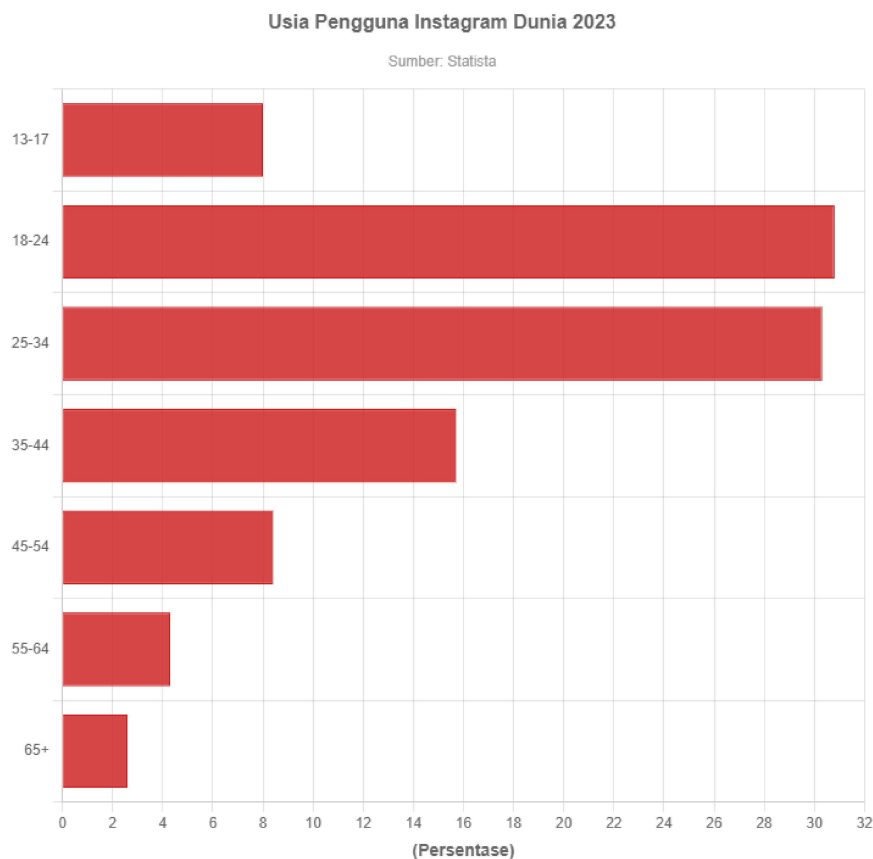
**Grafik 1. 3** Media Sosial yang Paling Banyak Digunakan di Indonesia 2023

Pada diagram diatas menunjukkan bahwa Di Indonesia, Youtube dan Facebook tetap menjadi platform media sosial paling diminati. TikTok menduduki posisi ketiga dan berhasil mengungguli popularitas Instagram. Sementara Facebook Messenger, Twitter, LinkedIn, dan Snapchat berada di bawah keempat platform tersebut dalam hal popularitas. Namun Instagram tetap menjadi primadona karena fitur-fiturnya yang disukai oleh seluruh kalangan. Fitur tersebut dimulai dari Boomerang, Reels, video pendek, Live dan beberapa fitur lainnya.



**Grafik 1. 4** Jumlah Pengguna Instagram Di Dunia

Grafik diatas memperlihatkan laporan dari We Are Social, pada bulan April 2023, jumlah pengguna global Instagram telah mencapai 1,63 miliar orang. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 12,2% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year/yoy). Sementara itu, di Indonesia, jumlah pengguna Instagram telah mencapai 106 juta orang per bulan April 2023. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jumlah pengguna Instagram terbanyak keempat di dunia. Jumlah pengguna Instagram di Indonesia mengalami kenaikan signifikan sebesar 18,9% jika dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, yang mencapai 89,15 juta orang per bulan Januari 2023. Negara dengan jumlah pengguna Instagram terbanyak adalah India, dengan 326,55 juta pengguna. Menurut We Are Social, Instagram menempati posisi keempat dalam daftar aplikasi paling populer di dunia per April 2023, berada di bawah Facebook, YouTube, dan WhatsApp.



**Grafik 1. 5** Usia Pengguna Instagram Tahun 2023

Grafik diatas telah menunjukkan bahwa Pengguna Instagram pada tahun 2023 secara signifikan didominasi oleh kelompok usia remaja dan dewasa muda. Sekitar 30,8% dari pengguna Instagram berada dalam kelompok usia 18-24 tahun. Sementara itu, kelompok usia 25-34 tahun menduduki posisi kedua dengan persentase sekitar 30,3%, dan kelompok usia 35-44 tahun berada di posisi ketiga dengan andil sebesar 15,7%. Perlu diperhatikan bahwa Instagram terus mengalami pertumbuhan dalam popularitasnya. Hingga saat ini, Instagram merupakan platform media sosial dengan jumlah pengguna terbanyak di Indonesia. Sebanyak 86,5% dari penduduk Indonesia berusia 16-64 tahun adalah pengguna Instagram.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian lain yang juga menarik, yang dilakukan oleh Business Insider pada tahun 2019. Penelitian ini melibatkan 1.884 orang dengan rentang usia antara 13 hingga 21 tahun, dan hasilnya secara khusus menunjukkan bahwa 59% dari responden mengakses berita politik melalui media

sosial, di mana sekitar 65% di antaranya menjadikan Instagram sebagai sumber utama (El Qudsi & Syamtar, 2020). Oleh karena itu, menjadi wajar jika Instagram menjadi salah satu wadah yang perlu dipertimbangkan dengan serius dalam konteks politik. Instagram telah menjadi semacam "saluran" yang sangat penting bagi Generasi Z untuk mendapatkan informasi sehari-hari, termasuk informasi seputar isu-isu politik.

Saat ini, kampanye melalui media sosial telah terbukti lebih efektif dibandingkan dengan menggunakan baliho dan spanduk. Individu yang relatif teredukasi dan memiliki akses informasi yang baik, kini lebih cenderung mempercayai pendapat dari teman atau rekan mereka di platform media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa setiap individu memiliki potensi untuk memengaruhi orang lain. Oleh karena itu, secara humoris dapat dikatakan bahwa di media sosial, tidak berlaku lagi prinsip "satu orang, satu suara," melainkan satu individu dapat memiliki pengaruh yang setara dengan puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan orang. Media sosial juga memainkan peran yang sangat efektif sebagai wadah untuk bertukar ide. Penyebaran berbagai gagasan, termasuk konten kampanye politik, dapat berlangsung dengan sangat cepat dan hampir tanpa batas (Anggraini et al., 2022).

Meskipun begitu, tidak selalu terdapat hubungan negatif antara politik dan media sosial. Sebaliknya, media sosial juga memberikan dampak positif terhadap pemilih pemula. Generasi muda saat ini dapat dengan mudah mengakses informasi untuk membentuk sikap politik mereka. Lebih jauh, melalui media sosial, demokrasi memiliki kesempatan untuk menyuarakan pendapat dengan lebih terbuka. Komentar-komentar di kolom diskusi politik di akun media sosial juga seringkali menjadi tempat di mana berbagai argumen saling beradu. Dimana hal itu menunjukkan keaktifan generasi Z dalam memainkan perannya sebagai penerus bangsa.

Pada tanggal 31 Mei 2023, Jefridin, M. Pd, Sekretaris Daerah Kota Batam, mewakili Wali Kota Batam, secara resmi membuka kegiatan Gerakan Cerdas



Memilih RRI Batam. Acara ini bertujuan untuk Memperkuat Demokrasi Melalui Partisipasi Pemilih Pemula, dengan tema "Menuju Pemilih Cerdas Untuk Indonesia Hebat". Kegiatan ini dihadiri oleh pelajar dan mahasiswa di Kota Batam, dan diadakan di Auditorium Politeknik Batam. Sosialisasi ini bertujuan agar para pemilih pemula dapat memahami aturan Pemilu dan menjadi pemilih yang cerdas. Terutama mengingat Pemilu serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 mendatang, Jefridin menekankan pentingnya kolaborasi untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Ia juga mengajak masyarakat Kota Batam, khususnya pemilih pemula, untuk tidak Golput.

Jefridin menekankan pentingnya memberikan hak suara dengan sebaik-baiknya untuk turut serta dalam menentukan pemimpin negara ini. Selain itu, ia juga menyarankan agar masyarakat bijak dan cerdas dalam menggunakan media sosial, serta membaca dan memahami informasi yang diterima dengan cermat. Agus Rusmin Nuryadin, Kepala stasiun RRI Batam, mengungkapkan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada pemilih pemula dan mendorong mereka untuk menggunakan hak pilihnya dengan baik demi menjaga kualitas Pemilu. Program Gerakan Cerdas Memilih bertujuan untuk mensosialisasikan segala hal yang terkait dengan Pemilu Serentak tahun 2024. Agar pemilih pemula dapat memahaminya dengan lebih mudah, kegiatan ini disajikan dalam format Variety Show yang mencakup dialog dan hiburan musik. Harapannya, melalui kegiatan ini, seluruh lapisan masyarakat, termasuk pemilih pemula dan kelompok marginal, akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang tahapan dan regulasi pemilu. Tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan angka partisipasi pemilih, mengurangi tingkat Golput, serta mendorong terlaksananya Pemilu dengan kualitas yang tinggi.

Selain itu Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam Marwadi, menengaskan bahwa adanya peningkatan dari keikutsertaan pemilih pemula terhadap Pemilu tahun 2024 yang akan datang yaitu mencapai angka sekitar 21% dari tahun sebelumnya. Sehingga dari semua data tersebut penulis tertarik untuk meneliti pengaruh media sosial Instagram terhadap persepsi pemilih pemula,

karena mereka merupakan kelompok pemilih yang pertama kali menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu. Serta mereka memiliki berbagai faktor penentu dalam menentukan pilihannya, seringkali pemilih pemula dianggap apatis terhadap politik di Indonesia, mungkin karena banyaknya berita palsu (hoaks) dan kurangnya pengetahuan politik hal ini membuat mereka rentan terhadap mobilisasi. Namun, di era digital saat ini, berbagai informasi mudah diakses, terutama melalui media sosial seperti Instagram. Platform ini digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan informasi politik yang akan mempengaruhi Pilkada serentak tahun 2024 di Kepulauan Riau.

Kelompok Umur Penduduk	10. Proyeksi Penduduk - Kelompok Umur (Laki-Laki + Perempuan) (Jiwa)	
	2020	
15-19		114218
20-24		110877

**Tabel 1. 2** Jumlah Penduduk Berdasarkan umur di Kota Batam

Berdasarkan hasil dari BPS (Badan Pusat Statistik) Kota Batam yang dilakukan sensus penduduk pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Mendapatkan angka dengan kategori umur 15 tahun sampai dengan 19 tahun yaitu 114,218 Jiwa, yang digabung dengan Jenis kelamin Laki-laki dan Perempuan. Sedangkan dikategori umur 20 sampai dengan 24 tahun yaitu 110.877 jiwa, yang digabung dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. maka hasil tersebut mendapati 225.095 jiwa. Berdasarkan hasil dari uraian yang tertera, peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan sebuah penelitian dengan mengangkat judul : “ **PENGARUH PENGGUNAAN INSTAGRAM TERHADAP PERSEPSI PEMILIH PEMULA DALAM PILKADA KEPRI 2024 (STUDI PADA REMAJA KOTA BATAM)**”

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang dapat diuraikan masalah-masalah penelitian sebagai berikut :

- Kurangnya pemahaman mengenai Pilkada terhadap pemilih pemula
- Kurangnya kesadaran dan kesediaan pemilih pemula dalam mengikut serta menjadi pengisi suara

## **1.3 Batasan Masalah**

Untuk mengindari luasnya pembahasan masalah, peneliti akan membatasi pemahaman masalah dalam penelitian ini yang berfokus pada Pengaruh Instagram terhadap persepsi sejumlah remaja di Kota Batam Yang berusia 17-22 Tahun

## **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang di uraikan di atas, maka adapun rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana Pengaruh Instagram sebagai literasi Politik terhadap persepsi pemilih pemula pada Pilkada di Kepulauan Riau Tahun 2024?

## **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Latar Belakang dan rumusan masalah yang di uraikan di atas, maka adapun tujuan Penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh Instagram sebagai literasi politik terhadap persepsi pemilih pemula pada Pilkada di Kepulauan Riau Tahun 2024.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

### **Manfaat Teoritis**

- Pada penelitian ini bisa memberikan masukan pada bidang ilmu komunikasi dan psikologi sosial dengan mengilustrasikan cara media sosial mempengaruhi sikap dan persepsi seseorang.

- Penelitian ini juga berkontribusi pada metode penelitian kuantitatif dengan menunjukkan cara-cara untuk mengukur pengaruh media sosial terhadap persepsi politik.
- Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pada penelitian yang terkait khususnya yang berkaitan dengan judul.

### **Manfaat Praktis**

- Pada penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumber pengetahuan bagi masyarakat luas terutama pemilih pemula terkait penggunaan instagram sebagai literasi politik bagi Pemilih Pemula dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kepulauan Riau.
- Pada penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memperluas wawasan pemilih pemula dalam mengakses dan menggunakan informasi politik yang ada pada media Instagram.
- Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Ilmu Komunikasi